

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Volume 25, Nomor 4, Oktober-Desember 2012



Konstruksi Realitas Impor Beras oleh KOMPAS Online:
Sebuah Analisis Wacana Kritis

Tantangan-tantangan Kesisteman Partai pada Aktivitas
Kepemiluan: Kasus PPP dan PKB Sampang pada Pemilu
Tahun 2009

Model Sekolah Bisnis *Multi Level Marketing* di Kota
Surabaya

Relasi Kebudayaan dalam Kebijakan Publik dan Sistem
Regulasi Negara

Potret Resiprositas dalam Tradisi *Nyumbang* di Pedesaan
Jawa di Tengah Monetisasi Desa

Globalisasi Ekonomi dan Ketergantungan Buruh
Perempuan

Strategi Nafkah Rumahtangga Petani Sasak Persawahan
dan Nelayan Sasak Pesisir di Lombok Timur

Konflik Sosial di Era Reformasi

Manusia sebagai Penentu Penciptaan Nilai dan Kinerja
Perusahaan Perbankan di Indonesia

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Merupakan terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan di bidang sosial, berkaitan dengan masyarakat, kebudayaan, dan politik; untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pimpinan Umum

I. Basis Susilo

Pimpinan Redaksi

Myrtati Dyah Artaria

Bendahara

Laily Fardillah

Redaksi Pelaksana

Helmy Prasetyo, Moordiati, A. Safril Mubah, Philipus Keban, Dessy Harisanty

STT No 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981 ISSN 2086-7050

Izin Penerbit No. 0787/SK/Dir. PK/SIT/1969

Alamat Redaksi: Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Jl. Dharmawangsa Dalam (Timur Perpustakaan) Surabaya, 60286, Indonesia
Telp.: (031) 5017429 E-mail: mkpsurabaya@gmail.com
website: journal.unair.ac.id

Dicetak oleh Airlangga University Press. RK 312/09.14/AUP-B4E
Kampus C UNAIR Mulyorejo Surabaya 60115
Telp.: (031) 5992246. E-mail: aupsby@rad.net.id; aup.unair@gmail.com

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

<p>Konstruksi Realitas Impor Beras oleh KOMPAS Online: Sebuah Analisis Wacana Kritis <i>Construction of Reality Rice Imports by Kompas Online: A Critical Discourse Analysis</i> Abdul Gaffar</p>	233-241
<p>Tantangan-tantangan Kesisteman Partai pada Aktivitas Kepemiluan: Kasus PPP dan PKB Sampang pada Pemilu Tahun 2009 <i>Challenges in Party Activity System: The Case of PPP and PKB Sampang on Election 2009</i> Kris Nugroho</p>	242-252
<p>Model Sekolah Bisnis Multi Level Marketing di Kota Surabaya <i>Model of Multi Level Marketing Business School in the City of Surabaya</i> Retno Andriati</p>	253-262
<p>Relasi Kebudayaan dalam Kebijakan Publik dan Sistem Regulasi Negara <i>Cultural Relations in Public Policies and State Regulatory System</i> Hanief Saha Ghafur</p>	263-270
<p>Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa <i>The Portrayal of Reciprocity in "Tradisi Nyumbang" in Javanese Rural Area Amid Rural Monetization</i> Soetji Lestari, Titik Sumarti, Nurmala K. Pandjaitan, S.M.P. Tjondronegoro</p>	271-281
<p>Globalisasi Ekonomi dan Ketergantungan Buruh Perempuan <i>Economic Globalization and Dependency of Labor Women</i> Machya Astuti Dewi dan Nikolaus Loy</p>	282-288
<p>Strategi Nafkah Rumah Tangga Petani Sasak Persawahan dan Nelayan Sasak Pesisir di Lombok Timur <i>Household Livelihoods Strategy of Sasak Rice Farmers and Fishermen at East Coast Lombok</i> Adriana Monica Sahidu</p>	289-298
<p>Konflik Sosial di Era Reformasi <i>Social Conflict in the Reformed Era</i> Sindung Haryanto</p>	299-308
<p>Manusia sebagai Penentu Penciptaan Nilai dan Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia <i>Human Capital Determines the Value and Performance of Banking Companies in Indonesia</i> Moh. Nasih dan Rina Fariana</p>	309-319

Konflik Sosial di Era Reformasi

Social Conflict in the Reformed Era

Sindung Haryanto¹

Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung, Lampung

ABSTRACT

One of the social phenomenon recently was that social conflict involved mass violence. This article aimed to explore factors that cause the increased intensity of social conflicts that were accompanied by mass violence. The fundamental question to be answered was that whether the trans violence in every social conflict was rooted in a growing culture of violence in society. In other words whether the Indonesian people had violence culture, orit was only an excess of social reform and public policy in the past few decades. This article used literature review to be analysed and later to conclude what factors affecting social conflict involving mass violence. It concluded that the factors that caused social conflict was very complex. Several factors could be identified such as economic inequality, the politization of racial (SARA), cultural strategy that was not sufficient to accomodate the difference. Several factors were supported by the implementation of policies that would contribute the social conflict.

Key words: social conflict, reform, public policy

ABSTRAK

Salah satu fenomena sosial yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah konflik sosial yang melibatkan tindak kekerasan massa. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya intensitas konflik sosial yang disertai dengan kekerasan massa. Pertanyaan mendasar yang akan dijawab adalah apakah kekerasan yang terjadi dalam setiap konflik sosial tersebut berakar pada budaya kekerasan yang tumbuh di masyarakat. Dengan kata lain, apakah memang bangsa Indonesia secara genuine memiliki budaya kekerasan, ataukah kekerasan dan konflik sosial tersebut hanya merupakan eksek reformasi dan kebijakan publik yang berlangsung selama beberapa dekade terakhir. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelusuran literatur atau studi pustaka. Simpulan yang dapat ditarik dari artikel ini adalah bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik sosial sangat kompleks. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi antara lain kesenjangan ekonomi, politisasi SARA, strategi kebudayaan yang tidak cukup mengakomodasi perbedaan. Beberapa faktor tadi ditunjang dengan berbagai kebijakan yang dalam implementasinya justru memberikan kontribusi bagi terjadinya konflik sosial.

Kata kunci: konflik sosial, reformasi, kebijakan publik

Salah satu fenomena sosial yang marak terjadi akhir-akhir ini adalah konflik sosial yang melibatkan tindak kekerasan massa. Hampir setiap hari selalu terjadi kerusuhan massa di berbagai daerah yang terkadang dipicu oleh persoalan-persoalan yang sepele. Perkelahian massa antar suporter kesebelasan sepakbola, antar pendukung calon pemimpin daerah dalam pemilukada, antar pendukung organisasi massa, antar kampung, antar suku, antar pelajar, mahasiswa dan sederet kerusuhan lain, seolah menjadi berita yang "awam" ditemukan di berbagai media massa. Selain itu hampir dalam setiap demonstrasi

yang terjadi selalu berakhir dengan tindak anarkis dan kericuhan yang menyebabkan jatuhnya korban, kerusakan fasilitas umum dan harta benda. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan massa terhadap (tersangka) pelaku tindak kriminal juga kian menjadi peristiwa yang biasa terjadi di mana-mana.

Sementara itu beberapa kasus konflik sosial lain mempunyai konsekuensi yang luas karena secara langsung merefleksikan ancaman disintegrasi bangsa. Dalam kurun waktu kurang lebih dua dasa warsa terakhir, serentetan peristiwa konflik dan kerusuhan massa yang mengancam keutuhan bangsa terjadi di

¹ Korespondensi: S. Haryanto, Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung. Kampus Gedung Meneng, Bandar Lampung. Telepon: 081540828319. E-mail: sindungharyanto@yahoo.co.id

berbagai daerah. Peristiwa-peristiwa konflik sosial seperti yang terjadi di berbagai daerah di Kalimantan, Aceh, Maluku Utara, Kupang, Papua dan beberapa daerah lain merupakan bukti kuat bahwa integrasi nasional sedang menghadapi ancaman dan tantangan serius. Jika dipilah secara sederhana, berbagai peristiwa konflik sosial tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama konflik sosial yang ditimbulkan oleh motivasi gerakan separatisme, seperti yang terjadi di Aceh (GAM), Papua (OPM) dan Maluku Selatan (RMS). Kedua, konflik-konflik yang berbasis SARA.

Hasil temuan *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery* (UNSFIR), sebuah lembaga di bawah payung *United Nations Development Programme* (UNDP) menunjukkan, angka kematian akibat konflik sosial di Indonesia tahun 1990 hingga 2003 mencapai 10.758 jiwa, sementara insiden yang terjadi akibat kekerasan kolektif sebanyak 3.608 kasus (www.unsfir.or.id). Sementara itu di Kalimantan saja sejak tahun 1996 paling tidak telah terjadi tiga kali kerusuhan besar. Pertama, kerusuhan Sanggau-Ledo akhir tahun 1996 hingga awal 1997. Kedua, kerusuhan Sambas yang terjadi pada awal tahun 1999, dan terakhir kerusuhan yang terjadi bulan Oktober 2000 lalu di Pontianak. Dari sisi korban, ratusan orang tewas selama tiga tahun terakhir ini, ribuan rumah terbakar, dan jumlah pengungsi mencapai puluhan ribu orang. Dalam kasus pertikaian Sambas tahun 1999 saja, warga yang mengungsi mencapai lebih dari 24.000 orang (indonesia-p@indopubs.com).

Eskalasi kekerasan antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang masih marak terjadi di negeri ini. Beragam model konflik yang terjadi baik vertikal maupun horizontal seolah tidak ada tanda untuk berhenti. Terbukti dengan banyaknya kasus kekerasan seperti penyerangan terhadap Ahmadiyah (di Parung, Kuningan, Majalengka, Lombok, dll.), komunitas Salamullah (Lia Eden), Pondok Nabi di Bandung (2004), Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) di Probolinggo Jawa Timur serta beberapa penyerangan terhadap aliran yang dianggap sesat dan budaya yang bertentangan dengan golongan *mainstream* (Zada, 2006). Razia, *sweeping* atau apapun istilahnya yang dilakukan kelompok masyarakat tertentu berbasis komunitas aliran agama juga sering diwarnai kericuhan dan tindak represimassa. Perusakan terhadap warung yang menjual minuman keras atau yang menjadi tempat prostitusi terselubung, penyerangan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), penyerangan terhadap kantor Lembaga Sensor

Film (LSF) yang telah meloloskan film bertema pornografi merupakan beberapa contoh fenomena yang merefleksikan kian kuatnya fundamentalisme agama yang mengakibatkan tindak kekerasan massal dan diskriminasi.

Apapun jenis konflik sosial yang terjadi, selalu bermuara pada meningkatnya intensitas penderitaan yang dialami masyarakat. Dari berbagai peristiwa tersebut, hampir tidak dapat terhitung lagi jumlah korban jiwa melayang sia-sia, jumlah penduduk yang terpaksa harus mengungsi bahkan meninggalkan kampung halaman untuk selamanya, jumlah harta benda yang mengalami kerusakan atau musnah terbakar, jumlah anak yang kemudian menjadi yatim (piatu) atau terlantar pendidikannya serta akibat-akibat lain. Secara makro, konflik sosial tersebut juga telah mendelegitimasi makna pembangunan itu sendiri, oleh karena dalam peristiwa konflik tidak jarang terjadi kerusakan berbagai infrastruktur “pembangunan”. Dampak konflik sosial tersebut merupakan *social cost* yang hampir sepenuhnya ditanggung masyarakat, oleh karena pada kenyataannya negara tidak memberikan santunan yang cukup memadai bagi korban konflik sosial.

Sementara itu menurut Dharmawan (2006), benturan sosial demi benturan sosial berlangsung dengan mengambil bentuk aneka-rupa yang menyentuh hampir di segala aspek (*frame of conflict*) kehidupan masyarakat (konflik agama, sumber daya alam, nafkah, ideologi, identitas-kelompok, batas teritorial, dan semacamnya). Salah hal yang perlu dicatat adalah bahwa apapun bentuk benturan sosial yang berlangsung akibat dari konflik sosial, maka akibatnya akan selalu sama yaitu stres sosial, kepedihan (*bitterness*), disintegrasi sosial yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aset-aset material dan non-material. Kehancuran aset-aset non-material yang paling kentara ditemukan dalam wujud “dekapitalisasi” modal sosial yang ditandai oleh hilangnya *trust* di antara para pihak yang bertikai, rusaknya *networking*, dan hilangnya *compliance* pada tata aturan norma dan tata tertib yang selama ini disepakati bersama-sama.

Artikel ini bertujuan mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik sosial yang disertai dengan kekerasan yang semakin marak. Pertanyaan mendasar yang akan dijawab adalah apakah kekerasan yang terjadi tersebut hanya pada budaya kekerasan yang memang sudah ada di masyarakat? Dengan kata lain apakah memang bangsa Indonesia secara *genuine* memiliki budaya kekerasan? Ataukah kekerasan dan konflik sosial tersebut hanya merupakan eksekusi reformasi yang

telah menandai perjalanan sejarah bangsa Indonesia menjelang berakhirnya abad 20. Pertanyaan terakhir ini menjadi sangat beralasan diajukan mengingat berbagai peristiwa konflik sosial mengalami eskalasi justru pada masa reformasi tersebut. Jika jawaban terhadap pertanyaan terakhir adalah benar, maka menjadi penting untuk mempertanyakan apakah reformasi yang telah berlangsung kurang lebih 12 tahun selama ini mampu mengantarkan bangsa Indonesia ke kehidupan yang lebih demokratis?

Metode

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelusuran literatur atau studi pustaka. Literatur yang dipakai meliputi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema artikel baik dalam bentuk buku, laporan hasil penelitian maupun jurnal. Fokus kajian diarahkan pada dua dimensi yakni kebijakan publik dan integrasi nasional.

Hasil Penelitian

Analisis Kebijakan Publik

Diferensiasi sosial berdasarkan perbedaan suku, agama dan identitas primordial lain merupakan keniscayaan yang sudah berlangsung lama. Dalam perkembangannya terjadi interaksi dan dinamisasi antar simbol identitas primordial di Indonesia. Penyebaran agama-agama di berbagai daerah di Indonesia, sering menggunakan simbol-simbol kebudayaan lokal untuk menarik simpati para calon pemeluknya. Fenomena yang muncul kemudian dalam realitas keberagamaan masyarakat pada umumnya adalah sinkretisme. Proses seperti ini berlangsung dengan tingkat absorpsi yang berbeda-beda antar daerah, sehingga jika dipetakan terjadi koinidensi berbagai domain identitas primordial yang menyulitkan untuk memilahkan sumber penyebab ketika terjadi konflik.

Dalam masa rejim Orde Baru, kompleksitas permasalahan SARA tersebut justru terletak pada politisasi isu SARA itu sendiri, di mana hampir tidak ada ruang publik untuk mendiskusikan permasalahan tersebut secara jernih. Isu SARA dianggap sebagai isu yang sangat sensitif dan pembahasan terhadap isu tersebut dianggap "berbahaya" karena akan mengganggu stabilitas dan integrasi nasional. Melalui berbagai cara, konflik-konflik sosial yang berbasis SARA ditutup-tutupi dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga yang nampak di permukaan adalah konflik "biasa" antar kelompok masyarakat.

Kelompok-kelompok yang terlibat konflik mendapat label (stigma) negatif. Akibat yang terjadi adalah tumbuhnya egosentrisme, etnosentrisme dan kecurigaan antar golongan.

Pelabelan (*labelling*) semacam itu menjadi alasan pembenar bagi aparat untuk melakukan tindakan represif terhadap pelaku konflik. Dalam setiap peristiwa konflik, selalu terdapat kelompok-kelompok tertentu yang "dikorbankan" (dijadikan sebagai kambing hitam). Kelompok-kelompok tersebut juga didiskreditkan dengan berbagai label negatif. Ciri lain dari politisasi SARA pada masa ini adalah lahirnya berbagai kebijakan diskriminatif baik yang menyangkut kehidupan agama, ekonomi maupun aspek-aspek yang lain. Akibatnya terdapat kelompok-kelompok tertentu yang sangat diuntungkan dari kebijakan tersebut, dan hal ini pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial yang merupakan potensi bagi terjadinya konflik sosial.

Berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru ikut menyumbang terjadinya serangkaian gejolak hubungan antar golongan di Indonesia. Diantaranya adalah politik SARA yang membatasi diskusi mengenai suku, agama, ras dan antar golongan di ruang publik; pengakuan terhadap lima agama resmi; peraturan yang diskriminatif rasial (tercatat 63 buah); peraturan yang diskriminatif dalam bidang agama (tercatat 44 buah); di samping peraturan yang diskriminatif dalam bidang ekonomi (54 buah Keppres dan Inpres) yang sangat menguntungkan Soeharto beserta kroni-kroninya (Rajab 1996). Sebagai alat utama pendukung politik SARA, negara menggunakan militer untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut.

Pada aspek ekonomi, paradigma pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme "*trickle down effect*", merupakan katalis terjadinya berbagai bentuk ketimpangan. Paradigma ini diterjemahkan ke dalam berbagai strategi dan kebijakan seperti strategi pembangunan *urban biased*, strategi pro efisiensi, kebijakan liberalisasi ekonomi dan sebagainya. Muara berbagai kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya indeks ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan seperti ini selanjutnya menimbulkan dampak saring (*filtering effect*) yang menghambat peluang kaum miskin dalam memperoleh berbagai pelayanan publik.

Faktor-faktor yang bersifat struktural bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi katalis meningkatnya ketimpangan. Hambatan yang bersifat kultural juga berkontribusi. Di antara hambatan kultural tersebut misalnya interpretasi dan pemaknaan

nilai-nilai budaya lokal yang mengalami reduksi atau misinterpretasi. Penelitian yang dilakukan Haryanto (2001) menunjukkan bahwa budaya lokal menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi sehingga menimbulkan kesenjangan antara penduduk asli dengan pendatang.

Kesenjangan antara pendatang dan penduduk asli semakin besar karena ketidakmampuan penduduk asli merespon pembangunan ekonomi. Para pendatang dengan berbagai “keunggulan kompetitifnya”, mampu mendapat peluang memperoleh sumber daya (politik dan ekonomi) lebih banyak. Mekanisme dampak saring ini juga mengakibatkan akumulasi aset ekonomi pada sekelompok kecil pendatang berhadapan dengan makin tersisihnya penduduk asli dari berbagai peluang ekonomi (Suharman, 1997). Secara umum kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat terus terjadi baik semasa Orde Baru maupun pada era reformasi (Tabel 1).

Pada masa transisi sekarang ini, di mana kebijakan pemerintah diarahkan pada desentralisasi, isu SARA dan potensi terjadinya konflik sosial berbasis SARA bukan berarti menjadi berkurang. Pelaksanaan otonomi daerah ditengarai justru menguatkan identitas primordial (khususnya etnis). Isu “putra daerah” yang mewarnai hampir setiap pemilihan kepala daerah merupakan salah satu contoh yang selanjutnya berpotensi melahirkan berbagai kebijakan publik yang diskriminatif (bias etnik). Selain itu terdapat pula kecenderungan untuk memperebutkan hak pengelolaan berbagai sumber daya strategis yang ada di suatu wilayah daerah otonom. Menguatnya primordialisme dapat pula dilihat dari kecenderungan maraknya pemekaran daerah (lihat Tabel 2).

Reformasi Indonesia yang dipelopori kaum intelektual secara teoritik pada dasarnya merupakan sebuah tahapan kemajuan atau “*working progress*” menuju demokrasi. Hal tersebut sangat berkaitan dengan motif yang melandasi gerakan reformasi yang memang lahir merupakan bentuk perlawanan terhadap tata kehidupan

Tabel 1.
Kelompok Penduduk Indonesia Berdasarkan Pengeluaran
Tahun 2002–2006

% Penduduk	% Pengeluaran (tahun)				
	2002	2003	2004	2005	2006
40% Terendah	20,92	20,57	20,80	20,25	19,20
40% Menengah	26,89	37,10	37,13	35,05	35,08
20% Teratas	32,19	42,33	42,07	44,70	45,72
Gini Rasio	0,29	0,32	0,32	0,37	0,35

Sumber: Bank Indonesia, 2006. Laporan Perkembangan Ekonomi.

Tabel 2.
Pemekaran Daerah Tahun 1999–2008

Tahun	Jumlah Provinsi Baru	Jumlah Kab. Baru	Jumlah Kota Baru	Total
1999	-	26	1	27
2000	5	1	-	6
2001	-	-	12	12
2002	1	19	3	23
2003	-	61	3	64
2004	1	-	-	1
2007	-	21	4	25
2008	-	6	-	6
TOTAL	7	134	23	164

Sumber: Diolah dari UU Pembentukan Daerah Baru, Sekretariat DPR 1999–2008

bernegara yang tidak demokratis. Cita-cita reformasi tidak sekedar jatuhnya rezim orde baru yang telah berkuasa selama lebih dari 32 tahun, melainkan yang lebih mendasar adalah bagaimana agar norma-norma dan prinsip-prinsip demokrasi diaplikasikan secara luas baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Singkatnya, demokrasi tidak hanya sekedar berdimensi tunggal yakni hanya berkaitan dengan urusan politik *an sich*, melainkan yang lebih penting menjadi karakter bangsa Indonesia, di mana terkandung sejumlah nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, toleransi, kebersamaan, tanggungjawab, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan seterusnya. Ruang-ruang aplikasi nilai-nilai demokrasi tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga politik melainkan menjadi bagian integral dalam kehidupan keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja dan ruang-ruang publik lainnya.

Dalam kenyataannya, reformasi yang telah berlangsung lebih dari satu dekade belum memberikan hasil seperti yang diharapkan semula. Meskipun di era reformasi telah terjadi transisi sistem politik berupa sistem pemilihan umum yang demokratis, pers yang tumbuh bebas dan masyarakat sipil yang kian kuat, akan tetapi “demokratisasi” belum menyentuh seluruh lapisan birokrasi serta belum memberikan dampak positif terutama pada aspek tumbuhnya perilaku politik demokratis di tengah-tengah masyarakat. Reformasi seringkali diartikan oleh sebagian masyarakat hanya sebagai proses pergantian pejabat. Aturan pelaksanaan pemilihan pemimpin pusat hingga daerah yang tidak lagi menggunakan perwakilan melainkan sistem langsung, sering menimbulkan eksese berupa kekerasan dan anarkisme. Sementara itu pers yang bebas seringkali pula menjadi bebas yang “kebablasan” dalam arti melanggar hak-hak privasi individu.

Integrasi Nasional

Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dan masyarakatnya paling plural baik dari aspek horizontal maupun vertikal. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, berbagai kelompok etnis atau suku bangsa yang ada di wilayah nusantara ini bersepakat untuk membentuk suatu negara bangsa. Menurut Saifuddin (2009), dalam konteks Indonesia, negara merupakan suatu bentuk pengorganisasian warga masyarakat yang secara intrinsik berasal dari suku bangsa atau kelompok etnik tersebut. Konsep negara-bangsa (*nation-state*), misalnya, jelas sekali menunjukkan orientasi pemikiran antropologi ini. Nasionalisme yang sukses ditentukan oleh keterjalanan ideologi etnik dengan aparatur negara. Negara-bangsa, memandang pentingnya ideologi bahwa batas-batas politik harus saling mendukung dengan batas-batas kebudayaan.

Negara mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi resistensi yang terjadi dengan menggunakan sanksi hukuman, yang diterapkan bagi individu yang lebih loyal terhadap norma-norma kelompok dibandingkan dengan norma dan hukum-hukum negara. (Pizzorno, 1991:223). Birch dan Antlov (1989) menganalisis bagaimana kelompok etnik dan budaya yang saling berbeda mengikat diri ke dalam sebuah masyarakat nasional dan mendirikan negara nasional. Sebagai proses, integrasi nasional merupakan produk dari kebijakan pemerintah (atau elit) yang disengaja. Namun pada awalnya, integrasi nasional awalnya "tidak direncanakan" lewat proses mobilisasi sosial. Empat argumentasi diajukan dalam menjelaskan proses integrasi nasional. Pertama, dalam terminologi keniscayaan sejarah, Hegel menyatakan bahwa masa depan umat manusia terletak dalam organisasi yang disebut 'negara' sebagai bentuk tertinggi organisasi sosial yang ada di tengah masyarakat. Kedua, pandangan integrasi nasional sebagai bentuk asimilasi sosial. Integrasi nasional adalah terasimilasinya budaya-budaya yang lebih 'minor' kepada budaya yang lebih 'mayor'. Disintegrasi nasional muncul akibat asimilasi yang gagal dilakukan. Ketiga, integrasi nasional muncul akibat pemerintah didasarkan atas perasaan kesatuan nasional. Integrasi nasional tidak akan tercipta jika perasaan tersebut belumlah lagi terbangun. Untuk itu, masalah bahasa persatuan, ideologi nasional, merupakan komponen penting di dalam integrasi nasional. Keempat, integrasi nasional berhubungan dengan masalah representasi politik. Negara yang terbangun dari garis primordial berbeda memiliki sensitivitas tinggi warga negara atas aspek primordial

ini. Agama, etnis, region, merupakan unsur primordial yang perlu diperhatikan representasi politiknya. Pimpinan puncak nasional memerlukan kohesi yang membuat representasi elemen primordial yang berlainan tersebut menggapai konsensus.

Integrasi nasional dengan demikian dalam konteks Indonesia yang multikultural menjadi masalah sentral dalam menjaga eksistensi negara bangsa di masa depan. Menurut Koentjaraningrat (1982) integrasi nasional adalah usaha membangun interdependensi yang lebih kuat antar bagian dari organisme hidup antar anggota-anggotanya yang dianggap sama harmonisnya. Sedangkan menurut Coleman dan Rosberg seperti yang dikutip oleh Sjamsuddin (1991), integrasi nasional memiliki dua dimensi, yaitu vertikal (elite massa) dan horizontal (teritorial). Integrasi vertikal disebut juga integrasi politik, tujuannya untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara elite dan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Integrasi teritorial di lain pihak, adalah integrasi dalam bidang horizontal yang bertujuan mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedarahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Menurut Weiner (1968), integrasi bangsa sebagai bagian dari integrasi politik berarti bahwa bagi masyarakat majemuk yang meliputi berbagai suku bangsa, ras dan agama, integrasi bangsa dirasakan sangat penting untuk mengarahkan rasa kesetiaan masyarakat kepada bangsanya yang menyatukan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan satu identitas nasional.

Integrasi bangsa sebagai suatu proses dengan demikian memerlukan prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi. Di antara prasyarat tersebut adalah adanya nilai-nilai umum (*common value*) yang disepakati bersama. Nilai-nilai umum tertentu yang disepakati secara bersama itu tidak hanya disepakati oleh sebagian besar orang (etnik), namun harus dihayati melalui proses sosialisasi, akulturasi, asimilasi, dan enkulturasi. Mengikuti pemikiran Liddle (1970), konsensus nasional yang mengintegrasikan masyarakat yang pluralistik pada hakekatnya mempunyai dua tingkatan sebagai prasyarat bagi tumbuhnya suatu integrasi nasional yang tangguh. Pertama, sebagian besar anggota suku bangsa bersepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik dalam mana mereka sebagai warganya. Kedua, apabila sebagian besar anggota masyarakatnya bersepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan-aturan dari proses

politik yang berlaku bagi seluruh masyarakat di atas wilayah negara yang bersangkutan.

Integrasi sebagai suatu proses dalam perjalanan sejarah tidak selalu berjalan mulus, melainkan banyak hambatan. Berbagai konflik sosial terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa. Terdapat banyak penjelasan mengenai terjadinya berbagai konflik ini. Dalam perspektif politis, misalnya Amal (1992) menyebut paling tidak terdapat empat pilar penjelasan. Keempat faktor tersebut adalah: ketimpangan struktur ekonomi yang mencolok antara Jawa dan luar Jawa, kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang sentralistis yang tidak memberikan ruang yang memadai terhadap otonomi daerah, pengorganisasian militer yang tumpang tindih dengan pengorganisasian sipil dan bahkan sekaligus menjadi satu kesatuan dengan polarisasi kultural, dan adanya perdebatan mengenai dasar negara.

Dalam perspektif antropologis, sumber konflik sosial lebih berada pada aspek-aspek kultural yang ada pada masyarakat tersebut. Menurut Koentjaraningrat (1982), paling sedikit ada lima macam sumber konflik antara suku-suku bangsa yang terdapat pada negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia yaitu: 1) warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencaharian hidup yang sama, 2) warga dari suku bangsa yang mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaannya kepada warga dari suatu suku bangsa lainnya, 3) warga dari suatu suku bangsa mencoba memaksakan konsep-konsep agamanya terhadap warga suku bangsa lainnya yang berbeda agama, 4) satu suku bangsa berusaha mendominasi suatu suku bangsa lain secara politis, 5) jika sudah terdapat potensi konflik yang terpendam di antara suku bangsa itu sendiri.

Nordholt sebagaimana dikutip Amirrachman (2007:3) menyatakan bahwa kekerasan di Indonesia dalam derajat tertentu merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda. Paling tidak terdapat dua gelombang kekerasan yang terjadi pada periode tersebut. Pertama, kekerasan yang terjadi sepanjang akhir abad 17 yakni ketika VOC mengupayakan monopoli perdagangan dengan menguasai daerah-daerah strategis. Kedua, kekerasan yang terjadi antara tahun 1871-1910, ketika penduduk pribumi mengalami era perluasan imperialisme. Pada masa ini terjadi 32 kali perang kolonial yang berkecamuk di berbagai daerah. Bagi pemerintah kolonial, Aceh merupakan daerah yang paling banyak menghabiskan energi yang digunakan untuk berperang.

Tindakan kekerasan yang sistematis di Indonesia telah ada sejak jaman kolonial Belanda dan terus mengalami peningkatan setelah kemerdekaan. Jumlah korban akibat tragedi 30 September 1965 (Gerakan G-30 S PKI) jauh lebih besar jika dibandingkan jumlah korban sebelum kemerdekaan. Tragedi tersebut telah merenggut hampir setengah juta orang dan merupakan tindak kekerasan terbesar dalam sejarah Indonesia, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, tindakan represif yang dilakukan negara serta menjadi pemicu bagi tindak kekerasan dalam empat dekade berikutnya. Tragedi tersebut tumpang tindih dengan tindak kekerasan antar masyarakat (*inter-communal violence*) yang menjadi korban kebiadaban anggota PKI (Adam, 2008).

Aditjondro yang melakukan studi konflik-konflik sosial di Indonesia, merumuskan kesimpulannya yang kemudian disusun dalam 13 (tiga belas) tesis mengenai konflik sosial di Indonesia. Salah satu tesisnya menyatakan bahwa konflik dan kerusuhan sosial di antara berbagai komunitas di daerah-daerah kerusuhan seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku, bahkan juga di kota-kota besar di Jawa, mengalami eskalasi, karena ketumpangtindihan antara faktor-faktor kelas, etnisitas, dan agama dari komunitas-komunitas yang bertikai. Kelas atas didominasi oleh komunitas atau kelompok etno-linguistik tertentu yang memeluk agama tertentu, sedangkan kelas bawah didominasi oleh kelompok etno-linguistik yang memeluk agama lain (Aditjondro, 2009).

Terdapat banyak teori yang dapat dipakai untuk menjelaskan konflik yang terjadi di masyarakat. Meningkatnya ketidakpuasan yang muncul dari persepsi deprivasi relatif merupakan basis gerakan yang mendorong pelaku terlibat dalam kekerasan kolektif (Gurr, 1970). Deprivasi yang terjadi menyebabkan seseorang yang tidak memiliki apa-apa akan mengambil resiko terlibat dalam konflik karena mereka merasa *nothing to lose* (Bueno de Mesquita, 1985; Popkin, 1979; Maslow, 1954). Menurut Knight (1995) kesenjangan pemilikan sumber daya menyebabkan tumbuhnya keinginan individu dan kelompok untuk menerima *bargaining demands* dari individu/kelompok lain. Orang yang paling mengalami deprivasi merupakan yang beresiko dan cenderung akan melakukan *bargaining* untuk memperoleh kesamaan di bidang ekonomi dan politik. Pendapat ini berdasarkan matrik teori *bargaining institutional* yang menyatakan bahwa individu yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar akan cenderung untuk berjuang mendapatkan

kekuasaan politik. Nagel (1974) berpendapat bahwa ketimpangan politik ini berkorelasi negatif dengan tingkat ketimpangan ekonomi. Terdapat jurang yang lebar antara kelompok yang kurang memiliki keinginan berkuasa dengan kelompok yang memiliki kesamaan dalam penguasaan sumber daya. Hal ini mempunyai implikasi bahwa kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan posisi memiliki daya dorong untuk melakukan pemberontakan.

Teori deprivasi secara tradisional mempertahankan pendapat bahwa kekerasan terjadi ketika kesenjangan ekonomi telah melampaui batas, di mana muncul perasaan ketidakpuasan yang meluas di berbagai kalangan yang bersumber dari disparitas pendapatan, jadi dengan demikian kesenjangan merupakan faktor penyebab terjadinya konflik. Kesenjangan ekonomi, deprivasi relatif, resiko, dan teori utilitas mengisyaratkan bahwa ketidakpuasan yang lahir dari kesenjangan ekonomi merupakan faktor endemik revolusi. Penelitian yang dilakukan Besançon (2005) memperkuat dugaan bahwa kelompok-kelompok yang mengalami deprivasi identitas lebih cenderung terlibat ketika terjadi konflik atau revolusi. Dari ketiga tipe konflik yang diuji yakni konflik etnik, revolusi dan genosida, kesenjangan ekonomi hanya memiliki hubungan yang ambigu pada konflik genosida. Kesamaan sosial politik merupakan hal yang penting dalam memetakan kekerasan etnik dan bahwa keserakahan merupakan faktor yang mendorong peningkatan kekerasan pada semua jenis konflik sipil, termasuk genosida.

Uraian di atas menunjukkan secara teoritik, kesenjangan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab konflik sosial. Fenomena kesenjangan ekonomi di Indonesia tercermin tidak saja dalam kesenjangan pendapatan (penguasaan aset ekonomi) antar golongan masyarakat melainkan juga kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Dalam banyak kasus, di berbagai daerah kesenjangan penguasaan aset ekonomi ini berhimpitan (*conclidated*) dengan domain suku (ras).

Faktor-faktor yang bersifat struktural tidak saja berada dalam komunitas desa, melainkan juga terdapat di luar komunitas desa (struktur makro). Sistem *patronage* merupakan salah satu bentuk hubungan struktural yang terdapat dalam komunitas desa. Pola-pola hubungan yang bersifat asimetris pada dasarnya terjadi juga dalam bidang-bidang kehidupan ekonomi yang lain. Misalnya saja dalam industri dikenal "pola kemitraan" dengan istilah "bapak angkat-anak angkat", "inti - plasma". Secara normatif, posisi "bapak angkat" maupun "perusahaan

inti" mempunyai fungsi ekonomi seperti misalnya menampung hasil produksi yang dihasilkan oleh industri "anak angkat" ataupun plasma. Selain fungsi ekonomi, terdapat pula fungsi sosial yang harus dijalankan oleh perusahaan inti ataupun "bapak angkat" berupa kewajiban-kewajiban untuk memberikan bimbingan dan jaminan sosial. Namun demikian kedua fungsi ini dalam kebanyakan kasus tidak dapat berjalan dengan baik. Secara sosiologis posisi kedua belah pihak ini tidaklah setara khususnya dalam posisi tawar (*bergaining position*), sehingga hubungan tersebut lebih merupakan hubungan yang bersifat eksploitatif.

Selain faktor kesenjangan ekonomi, konflik dan kerusuhan sosial juga berbasis hubungan antar etnik yang terjadi di suatu wilayah. Salah satu fenomena "unik" yang terjadi di dunia yang semakin mengglobal saat ini adalah menguatnya identitas primordial terutama etnisitas. Fenomena ini ditandai dengan maraknya berbagai konflik berbasis etnik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Fenomena tersebut dikatakan unik karena pada dasarnya bertentangan secara diametral dengan tesis globalisasi itu sendiri yang meminggirkan ikatan primordial. Namun kenyataannya, justru ikatan primordial (terutama etnisitas) inilah semakin menguat di tengah arus globalisasi. Hal ini merupakan paradok dan sekaligus menjadi pertanyaan besar yang sulit dipecahkan.

Secara teoritik terdapat beberapa penjelasan mengenai fenomena menguatnya ikatan primordialisme ini. Pertama adalah teori konflik ekonomi. Teori ini mengemukakan bahwa kebangkitan etnisitas adalah warisan historis daripada generasi (atau malah berabad-abad) dominasi ekonomi beberapa kelompok etnik oleh yang lainnya. Jenis teori lain yang dapat membantu untuk menjelaskan keberlangsungan etnisitas (jika bukan kebangkitannya yang kuat) kadang-kadang disebut primordialisme. Teori primordialisme berpendapat bahwa ikatan-ikatan etnik adalah jenis penggabungan manusia yang fundamental, yang dapat diperlunak tetapi tak pernah dapat dihilangkan sama sekali. Tidak seperti teori fungsionalis, pandangan ini berpendapat bahwa ikatan-ikatan etnik ini adalah fundamental bagi karakteristik dasar relasi-relasi manusia, termasuk ikatan-ikatan masyarakat industri (Sanderson, 1993).

Indonesia sebagai sebuah masyarakat majemuk, secara historis juga menunjukkan kecenderungan yang sama yakni menguatnya ikatan-ikatan primordial. Konflik-konflik lokal yang bernuansa SARA (sebut saja misalnya peristiwa Sanggau Ledo, Sambas, Sampit, Ambon, Poso, Kupang, Tasik

Malaya, Situbondo, berbagai konflik dengan skala yang lebih kecil di Jakarta, serta berbagai konflik lokal yang lain) mengindikasikan makin kuatnya ikatan-ikatan primordial. Indikasi menguatnya ikatan primordial saat ini makin terasa jika dibandingkan dengan relasi antar golongan yang terjadi pada masa kolonial. Kemajemukan masyarakat Indonesia pada masa kolonial lebih merupakan pengelompokan secara vertikal yang mencerminkan struktur masyarakat yang terstratifikasi secara sosial-ekonomi-politik. Dimensi-dimensi horizontal yang membagi masyarakat ke dalam golongan-golongan berdasarkan perbedaan agama, suku, dan ikatan primordial lain secara bersamaan berhimpitan dengan dimensi vertikal. Dengan demikian sifat konflik sosial yang terjadipun kemudian tidak bersifat eksklusif.

Setelah kemerdekaan, terjadilah perubahan konfigurasi struktur masyarakat secara drastis terutama pada dimensi vertikalnya. Para pemimpin dan tokoh-tokoh pribumi kemudian menjadi elit politik, sementara itu melalui berbagai kebijakan pemerintah, menjadikan golongan Timur Asing sebagai kelompok elit dalam bidang ekonomi. Masa rakyat yang merupakan mayoritas golongan *inlander* tetap menjadi kelompok marginal dalam berbagai aspek (ekonomi, politik, kultural). Kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat deskriminatif ini pada akhirnya menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat yang merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya berbagai peristiwa kerusuhan sosial bernuansa SARA yang marak terutama pada menjelang masa berakhirnya Orde Baru hingga saat ini. Tim Pakar LIPI yang melakukan penelitian di tiga kota, yakni Tasik Malaya, Pekalongan, dan Situbondo yang dilanda kerusuhan dalam kurun waktu 1996-1997, menyatakan bahwa penyebab munculnya kerusuhan itu adalah ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu ada persoalan menyangkut etnis dan agama, serta arogansi aparat pemerintah. Kesenjangan sosial ekonomi cenderung menumbuhkan kecemburuan dan memunculkan stereotipe etnik dan ras pendatang yang dianggap lebih berhasil, misalnya keturunan Cina (FORUM, 17 Agustus 1998).

Bentuk-bentuk ketimpangan lain yang lahir akibat kebijakan pemerintah bukan saja ketimpangan antar golongan yang terjadi di masyarakat melainkan juga ketimpangan antar daerah. Banyak daerah-daerah yang mempunyai potensi kekayaan alam berlimpah tetapi tidak mengalami kemajuan berarti. Sementara itu di lain pihak Jakarta dan berbagai kota besar di Jawa mengalami perkembangan luar biasa. Kenyataan seperti ini secara akumulatif menimbulkan kekecewaan di sebagian besar masyarakat yang pada akhirnya dapat meledak ke dalam berbagai bentuk tindak kekerasan yang bersifat massif.

Program transmigrasi yang dilakukan pemerintah juga menimbulkan akses kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan karena masyarakat transmigran pada umumnya mempunyai pengalaman sosial yang lebih baik terutama dalam memberikan respons terhadap berbagai kebijakan pemerintah, sehingga hal ini mengakibatkan akses terhadap kebijakan publik. Paul Harry sebagaimana dikutip Suharman (1997) membuat perbandingan akses masyarakat pada pelayanan publik antara masyarakat transmigran dan penduduk asli, sebagaimana tersaji dalam tabel 3.

Uraian di atas mengisyaratkan bahwa keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa daerah dan berbagai ikatan primordial lain secara *an sich* pada dasarnya bukan merupakan masalah bagi integrasi nasional. Akar permasalahannya sebenarnya justru terletak pada kebijakan-kebijakan publik yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan ketimpangan relasi antar golongan dalam masyarakat. Dengan demikian diperlukan tinjauan dan telaah kritis atas berbagai kebijakan publik yang telah terbukti menimbulkan berbagai dampak buruk bagi hubungan antar golongan masyarakat di tanah air. Selain itu yang lebih penting dan mendasar untuk dilakukan adalah perubahan paradigma yang digunakan dalam melihat realitas keragaman etnik dan bentuk-bentuk pluralisme yang lain.

Menurut Rajab (1996), pendekatan yang berkembang sejak lama di lingkungan ilmu-ilmu sosial dalam melihat kemajemukan cenderung untuk meletakkan suatu kelompok masyarakat sebagai suatu komunitas yang tertutup dan merupakan suatu

Tabel 3.
Perbandingan Akses Masyarakat pada Pelayanan Publik

Kelompok Masyarakat	Instansi Pemerintah					
	Dinas Pertanian	Dinas Peternakan	Dinas Perkebunan	Dinas Perikanan	Bimas	Koperasi
Transmigran	***	***	**	**	***	***
Penduduk Asli	*	**	**	***	**	0

Keterangan: *** = besar, ** = sedang, * = kecil, 0 = tidak ada

entitas (*entity*) yang berbeda secara diametral dengan entitas lain sehingga sulit untuk dapat berhubungan. Masing-masing entitas dilihat memiliki kehendak untuk berdiri sendiri dan senantiasa mengabaikan dan menempatkan entitas lain sebagai "lawan". Pendekatan semacam ini sudah selayaknya untuk ditinjau kembali mengingat terdapat beberapa kelemahan secara mendasar. Pertama, bahwa tidak selamanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain bersifat diametral. Kedua, perbedaan-perbedaan antar golongan dalam masyarakat pada dasarnya dapat dipersatukan dan dikonsolidasikan guna mendukung tercapainya tujuan masyarakat secara luas. Beberapa negara yang memiliki sifat kemajemukan secara historis telah berhasil mempersatukan keanekaragaman budaya masyarakatnya ke dalam sebuah bejana lebur (*melting pot*), hingga tidak terjadi konflik-konflik yang dapat mengancam integrasi sosial. Di dalam konteks perdebatan tentang pluralisme, Wertheim dan Evers (dalam King 2000) menyatakan perlunya penekanan kepada hirarki sosial, selain daripada isu etnisitas.

Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik sosial sangat kompleks. Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi antara lain adalah kesenjangan ekonomi, politisasi SARA, strategi kebudayaan yang tidak cukup mengakomodasi perbedaan. Beberapa faktor tadi ditunjang dengan berbagai kebijakan yang justru mempunyai kontribusi bagi terjadinya konflik. Meskipun sebenarnya kebijakan tersebut tidak "dirancang" untuk itu. Kebijakan-kebijakan yang ada telah mempunyai akses bagi terjadinya konflik. Dengan demikian sejauh ini konflik yang terjadi bukan *by design*. Kemungkinan konflik sosial terjadi karena *by design* tetap ada akan tetapi hal itu agak sulit dibuktikan. Dari berbagai pengalaman konflik yang terjadi di tanah air menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki banyak kearifan lokal baik dalam mencegah terjadinya konflik maupun dalam mengatasi juga sudah terjadi.

Daftar Pustaka

- Adam AW (2008) The History of Violence and the State in Indonesia. CRISE WORKING PAPER No. 54 June 2008. Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, CRISEQueen Elizabeth House. Oxford: University of Oxford.
- Aditjondro GY (2009) Tesis Konflik Sosial di Indonesia [Diakses 8 Desember 2009]. <http://dongants.wordpress.com>.
- Amal I (1992) Regional And Central Government In Indonesian Politics: West Sumatra And South Sulawesi 1949-1979. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amirrachman A (2007) Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso. Cet Pertama. Jakarta: ICIP dan European Mission.
- Birch AH&Antlov H (1989) Nationalism and National Integration. Routledge
- Besançon ML (2005) Relative Resources: Inequality In Ethnic Wars, Revolutions, And Genocides [Diakses tanggal 20 Desember 2009]. Marie_Besancon@harvard.edu.
- Bueno de Mesquita B (1985) The war trap revisited. American Political Science Review 79(1): 156-177.
- Dharmawan AH (2009) Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat) [Diakses tanggal 20 Desember 2009]. <http://www.psp3ipb.or.id>.
- Gurr T (1970) Why Men Rebel. Princeton, NJ: Princeton University Press
- Haryanto S (2001) Etnisitas dan Perkembangan Bisnis Kecil. Laporan Penelitian BBI (tidak dipublikasikan).
- King VT (2000) The Sociology of South-East Asia, A Critical Review of Some Concepts and Issue. [Diakses Tanggal 20 Desember 2009]. <http://media.isnet.org>.
- Knight J (1995) Models, Interpretations, and Theories: Constructing Explanations of Institutional Emergence and Change', in J. Knight & I. Sened, eds., Explaining Social Institutions. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press (95-121).
- Koentjaraningrat (1982) Masalah-Masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan, Jakarta: LP3ES.
- Liddle WR (1970) Ethnicity, Party, and National Integration: An Indonesian Case Study. New Haven and London: Yale University Press,
- Maslow A (1954) Motivation and Personality. New York: Harper.
- Nagel J (1974) Inequality and Discontent: A Nonlinear Hypothesis, World Politics 26 (4): 453-472.
- Pizzorno A (1991) On the individualistic theory of social order. In Pierre Bourdieu dan James S. Coleman (eds.). Social Theory for a Changing Society. Boulder. San Fransisco. Oxford: Westview Press.
- Popkin S (1979) The Rational Peasant. Berkeley: University of California Press.
- Rajab B (1996) Pluralitas Budaya Masyarakat Indonesia. Dalam majalah Prisma. No. 6 Tahun XXV Juni 1996. Jakarta: LP3ES.

- Saifuddin AF (2009) Kesukubangsaan, Nasionalisme dan Multikulturalisme. [Dikases 9 Desember 2009]. <http://Interseksi.Org>.
- Sanderson SK (1991) Sosiologi Makro: Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial. Jakarta: Rajawali Press.
- Sjamsuddin N (1991) Dimensi-Dimensi Vertikal dan Horizontal dalam Integrasi Politik, Jakarta: PT. Gramedia.
- Suharman (1997) Beberapa Masalah Kerukunan Suku: Kasus Pembakaran Pasar Abepura, Irian Jaya. Dalam Mahfud MD et al. (editor). Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan. Jakarta: UII Press.
- Weiner M (1968). Litical Integration And Political Development And Social Change. New York: John Wiley.
- Zada K (2006) Prakarsa Perdamaian Pengalaman dari berbagai Konflik Sosial. Jakarta: PP Lakpesdam NU & European Initiative for Democracy and Human Rights (EIDHR) Komisi Eropa.